

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kemiskinan tetap menjadi persoalan penting bagi negara meskipun berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangnya. Pengentasan kemiskinan tetap menjadi program pembangunan suatu negara. Pengentasan kemiskinan penting bagi pertumbuhan perekonomian karena memerangi kemiskinan sebagai langkah mendasar dalam perjalanan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan semua tujuan strategis lainnya. Program dan strategi anti kemiskinan yang dilakukan pemerintah terlihat menurunkan angka kemiskinan, namun mengeluarkan masyarakat dari perangkap kemiskinan dan memperkecil ketimpangan diantara penduduk miskin dan yang tidak miskin merupakan tantangan terbesar semua pihak. Hal ini kemiskinan memiliki efek negatif pada tingkat pertumbuhan ekonomi, daya beli penduduk dan alokasi sumber daya (Zamhari, *et al.*, 2015).

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan Nasional adalah salah satu upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Simatupang & Saktyanu (2003), pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan Nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memiliki strategis atau instrument

pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan Nasional adalah efektivitas dan penurunan jumlah penduduk miskin.

Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas termasuk bagi pemerintah provinsi Jawa Timur. Upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur dilaksanakan melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi Jawa Timur melalui kebijakannya yang telah diklasifikasikan oleh permendagri no 42 tahun 2010. Dengan melalui 4 klaster kemiskinan yang pertama, kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga dengan kegiatan jaminan kesehatan daerah, bantuan operasional sekolah, bantuan keuangan siswa miskin, program keluarga harapan. Klaster kedua, kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan: jalinmatra bantuan rumah tangga sangat miskin, jalinmatra penanggulangan kerentanan kemiskinan, jalinmatra penanggulangan feminisasi kemiskinan, anti poverty program, kegiatan pemberdayaan fakir miskin dan pemberdayaan keluarga rentan. Klaster ketiga, kelompok program berbasis pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro dengan kegiatan koperasi wanita, koperasi pondok pesantren. Klaster keempat, kelompok program murah rakyat dengan kegiatan rumah tidak layak huni dan rumah susun sederhana dengan membayar sewa.

Baik pemerintah pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan

program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategis penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Jumlah penduduk miskin antar provinsi di Indonesia berbeda, pada tahun 2019 Indonesia telah berhasil mengurangi kemiskinan lebih dari setengah sejak tahun 1999, menjadi 9,4 persen. Menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,080 juta orang terhadap Maret 2018 (Badan Pusat Statistik, 2019). Persentase dan jumlah penduduk miskin menurut pulau pada Maret 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.1 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau, Maret 2019

Pulau	Persentase Penduduk Miskin			Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
Sumatera	8,28	11,37	10,03	2 096,64	3 754,65	5 851,29
Jawa	6,46	12,25	8,44	6 400,92	6 322,20	12 723,12
Bali dan Nusa Tenggara	8,89	17,88	13,81	596,75	1 449,38	2 046,13
Kalimantan	4,25	7,46	5,93	331,26	642,93	974,19
Sulawesi	5,61	13,37	10,23	444,69	1 565,16	2 009,85
Maluku dan Papua	4,97	29,12	20,91	124,54	1 415,60	1 540,14
Indonesia	6,69	12,85	9,41	9 994,80	15 149,92	25 144,72

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2019).

Berdasarkan Tabel 1. persentase dan jumlah penduduk miskin menurut pulau pada Maret 2019. Terlihat bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 20,91 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 5,93 persen. Dari sisi jumlah, sebagian besar

penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa (12,72 juta orang), sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan (0,97 juta orang) secara regional, penduduk miskin di Pulau Jawa mencapai 12,74 juta jiwa atau separuh total penduduk miskin di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2019).

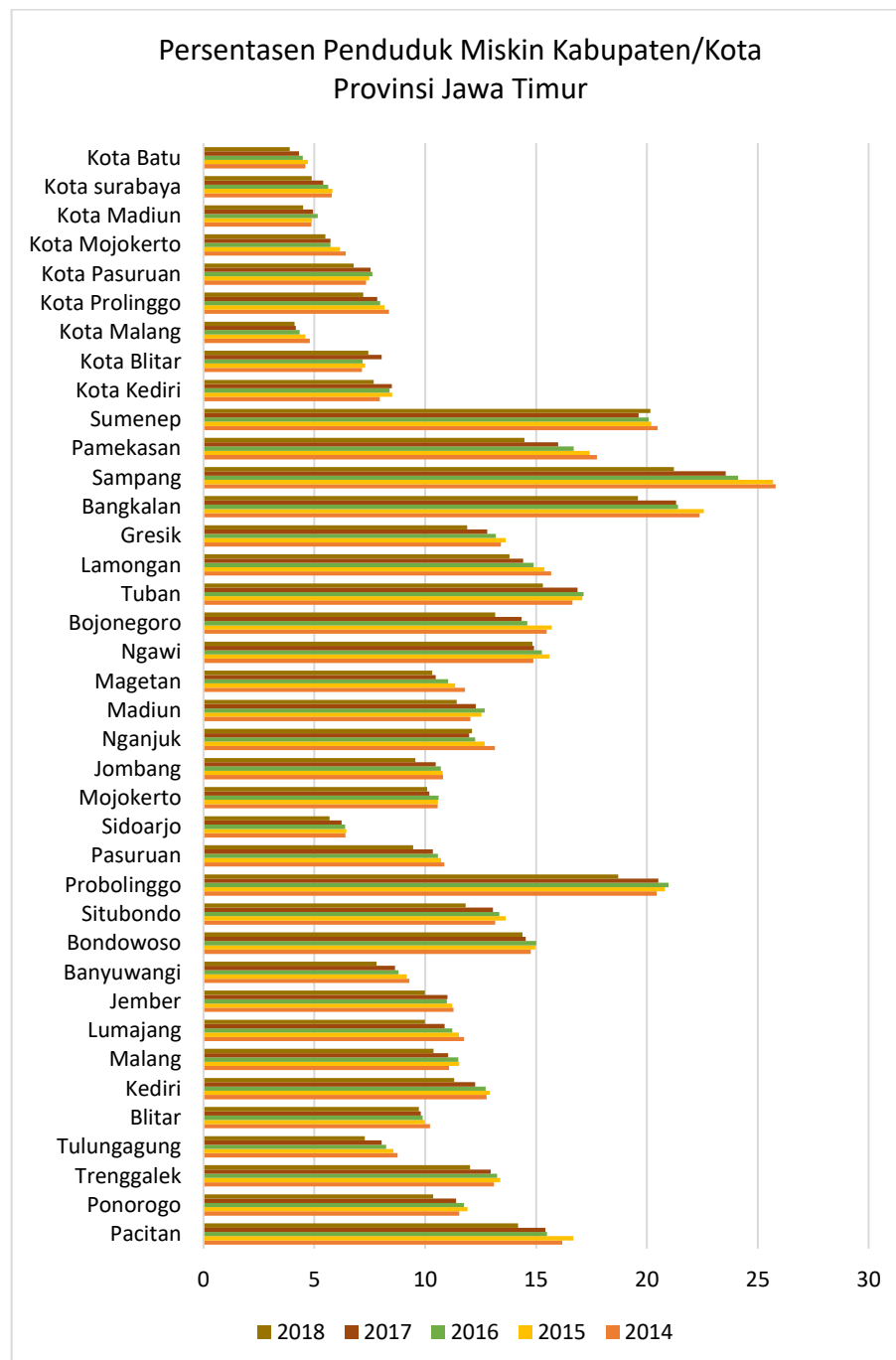
Berdasarkan data di atas, Pulau Jawa penyumbang terbesar jumlah penduduk miskin. Provinsi Jawa Timur menurut data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa. Pada Triwulan II tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,72 persen, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang hanya 5,02 persen. Pertumbuhan yang cukup signifikan ini karena Provinsi Jawa Timur mengandalkan konsumsi rumah tangga yang share-nya mencapai 59 persen. Artinya konsumsi rumah tangga bagus, maka pertumbuhan ekonomi juga bagus (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2019). Namun di sisi lain, Provinsi Jawa Timur sebagai wilayah dengan penduduk terbanyak setelah Jawa Barat masih terbelit dengan persoalan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun yang sama mencapai 4,056,00 juta orang (provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Pulau Jawa) dengan persentase 10,20 persen. Persentase penduduk miskin di Jawa Timur masih 0,96 persen di atas angka nasional. Terbukti Rasio Gini Provinsi Jawa Timur sebesar 0,364, artinya masih ada ketimpangan pendapatan yang diterima masyarakat (Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2020).

(UNDP, 1990) mengungkapkan bahwa kondisi perekonomian berkaitan erat dengan pencapaian kualitas sumber daya manusia disuatu wilayah yang salah satunya ditandai dengan rendahnya kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi

provinsi-provinsi di Jawa-Madura relatif lebih maju dibanding dengan provinsi lain, namun terdapat hal menarik antara pertumbuhan ekonomi dan pencapaian rendahnya angka kemiskinan provinsi di Jawa-Madura, dimana ditemukan bahwa rendahnya angka kemiskinan tidak selalu sejalan dengan pembangunan ekonomi. Hal ini didasarkan kondisi yang terjadi antara Provinsi Jakarta dan Jawa Timur, dimana Jakarta dengan angka kemiskinan terendah di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Sebaliknya, Jawa Timur yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari pada Jawa Tengah, seharusnya angka kemiskinannya lebih tinggi dari pada Jawa Tengah, tetapi kenyataannya justru lebih rendah dari pada Jawa Tengah.

Berbagai kegiatan pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah Jawa Timur khususnya di daerah tertinggal dibandingkan daerah lainnya untuk menyamaratakan pembangunan di berbagai wilayah. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memiliki strategis atau instrument pembangunan.

Permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur yang masih tinggi. Oleh sebab itu kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama terutama bagi pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar sebagai upaya pengentasan kemiskinan.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur.

Grafik 1.1

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan grafik diatas menunjukan bahwa kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur selama lima tahun terakhir mengalami

fluktuasi. Dimana kemiskinan di Kabupaten/Kota pada tahun 2018 kemiskinan tertinggi yaitu Kabupaten Sampang sebesar 21,21 persen, tertinggi kedua Kabupaten Sumenep yaitu sebesar 20,16 persen, dan tertinggi ketiga Kabupaten Bangkalan sebesar 19,59 persen. Sedangkan kemiskinan terendah di Kota Batu yaitu sebesar 3,89 persen dan yang kedua Kota Malang yaitu sebesar 4,10 persen. Keberhasilan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dalam menanggulangi kemiskinan belum sepenuhnya berhasil, ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, yaitu diatas angka 10 persen.

Permasalahan kemiskinan dipengaruhi banyak faktor. Menurut Tambunan (2011:99) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung adalah tingkat dan laju pertumbuhan output (atau produktivitas tenaga kerja), tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja (termasuk jenis pekerjaan yang tersedia), tingkat inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta kualitas sumber daya alam, ketersediaan fasilitas umum (seperti pendidikan dasar, kesehatan, informasi, transportasi, listrik, air, dan lokasi pemukiman), penggunaan teknologi, jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam suatu wilayah, etos kerja dan motivasi kerja, kultural/budaya atau tradisi hingga politik dan bencana alam, peperangan dan pertumbuhan ekonomi.

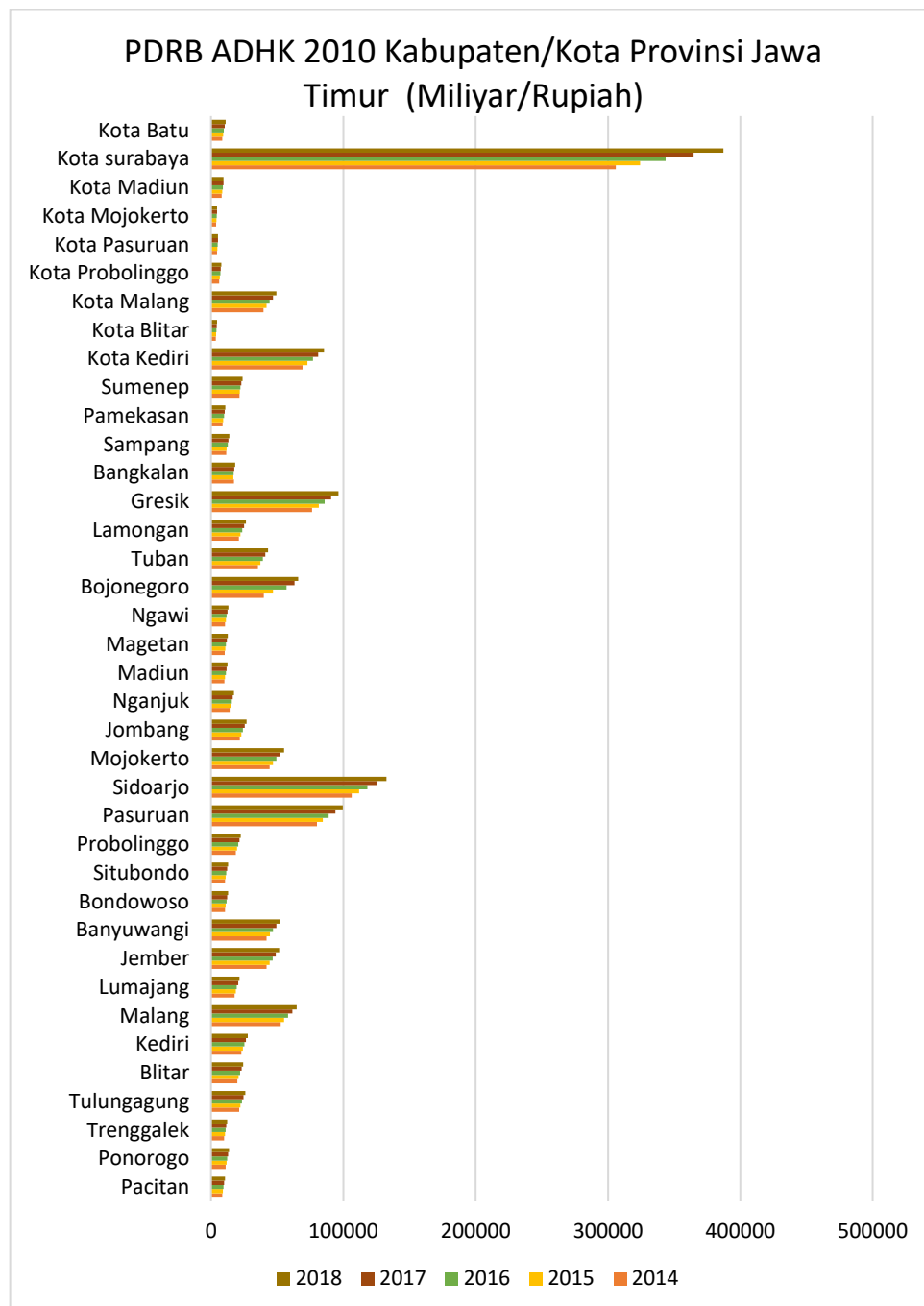
Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing-masing provinsi mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

PDRB merupakan salah satu indikator-indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode

(Hadi Sasana,2006). Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi atau peningkatan PDRB merupakan salah satu ukuran dan indikasi penting untuk menilai keberhasilan dari pembangunan ekonomi suatu daerah ditinjau dari sisi ekonominya. Namun demikian tingginya PDRB tidak menjamin bahwa seluruh penduduk disuatu wilayah telah menikmati kemakmuran, PDRB hanya merupakan gambaran secara umum dari kesejahteraan masyarakat, membaiknya indikator pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kemiskinan yang menjadi isu penting, PDRB sering digunakan sebagai indikator pembangunan, semakin tinggi PDRB suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut.

(Thamrin, 2001). Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB semakin sejahtera penduduk suatu wilayah dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang, PDRB merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah yang tercipta akibat proses produksi baik barang ataupun jasa di suatu wilayah/region pada suatu periode tertentu, biasanya setahun atau triwulan tanpa memperhatikan asal/domisili pelaku produksinya PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk melihat tingkat perkembangan perekonomian di suatu daerah.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur.

Grafik 1.2

PDRB ADHK 2010 Provinsi Jawa Timur Kabupaten/Kota (Miliyar Rupiah).

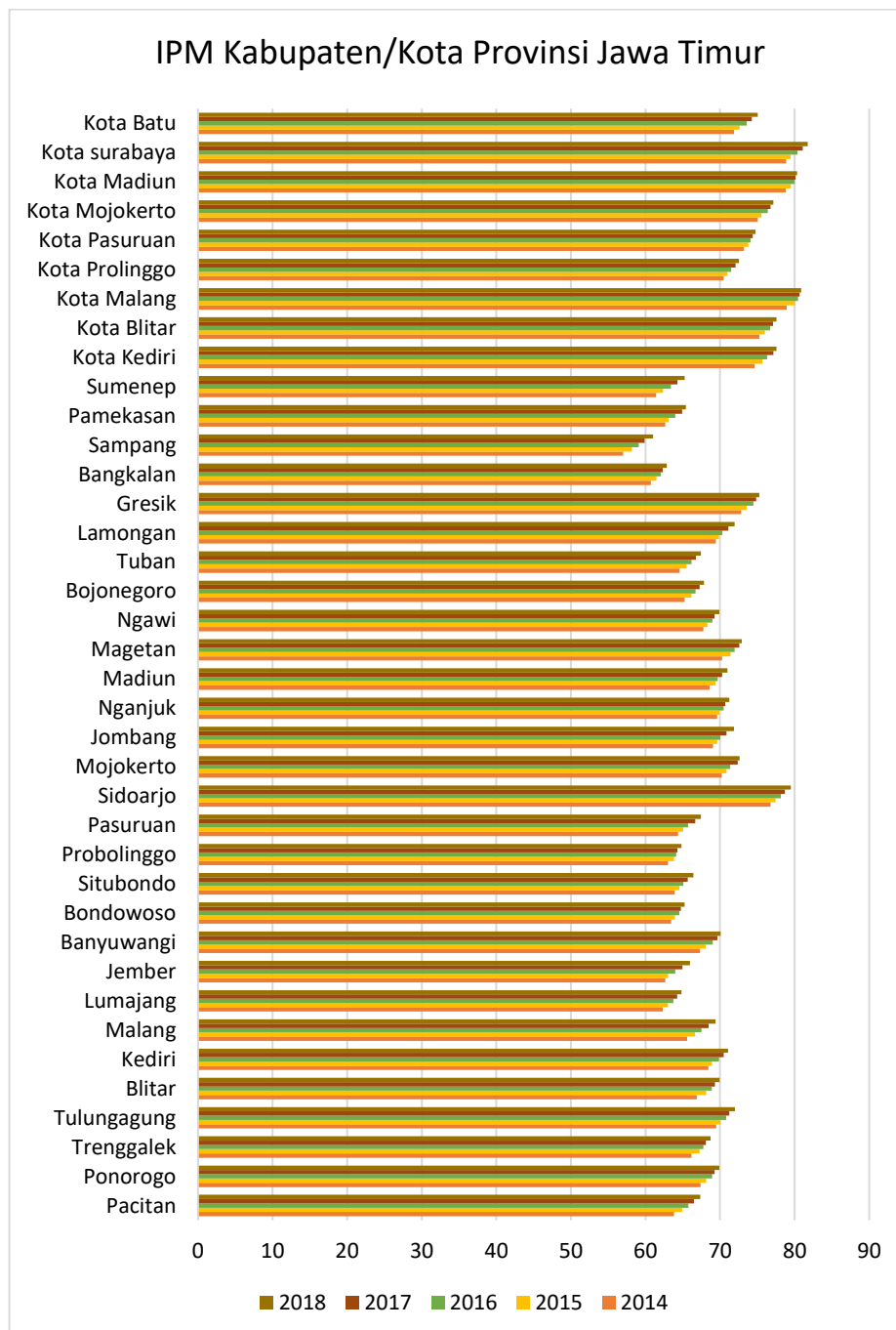
Berdasarkan grafik 1.2 diatas menunjukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (ADHK) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Dimana laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten/Kota pada tahun 2018 PDRB tertinggi yaitu Kota Surabaya sebesar 387333,39, tertinggi kedua Kabupaten Sidoarjo yaitu sebesar 132598,97 dan tertinggi ketiga Kabupaten Pasuruan yaitu sebesar 99553,38. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB terendah Kota Mojokerto yaitu sebesar 4460,44 dan terendah kedua yaitu Kota Blitar sebesar 4566,47.

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah salah satu tolak ukur pembangunan suatu wilayah yang berkorelasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut. Karena itu diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai IPM tertinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat di artikan pula jika nilai IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan rendah.

IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf, dan rata-rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapitan sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan hidup yang layak.

IPM berperan penting dalam pembangunan perekonomian modern sebab pembangunan manusia yang baik akan menjadikan faktor-faktor produksi mampu di maksimalkan. Mutu penduduk yang baik akan mampu untuk

berinovasi mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada. Selain dari itu indeks pembangunan manusia yang tinggi akan mengakibatkan jumlah penduduk akan tinggi pula sehingga akan menaikkan tingkat konsumsi. Hal ini akan mempermudah untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2006:430).



Sumber : BPS Jawa Timur.

Grafik 1.3

**Persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Provinsi
Jawa Timur.**

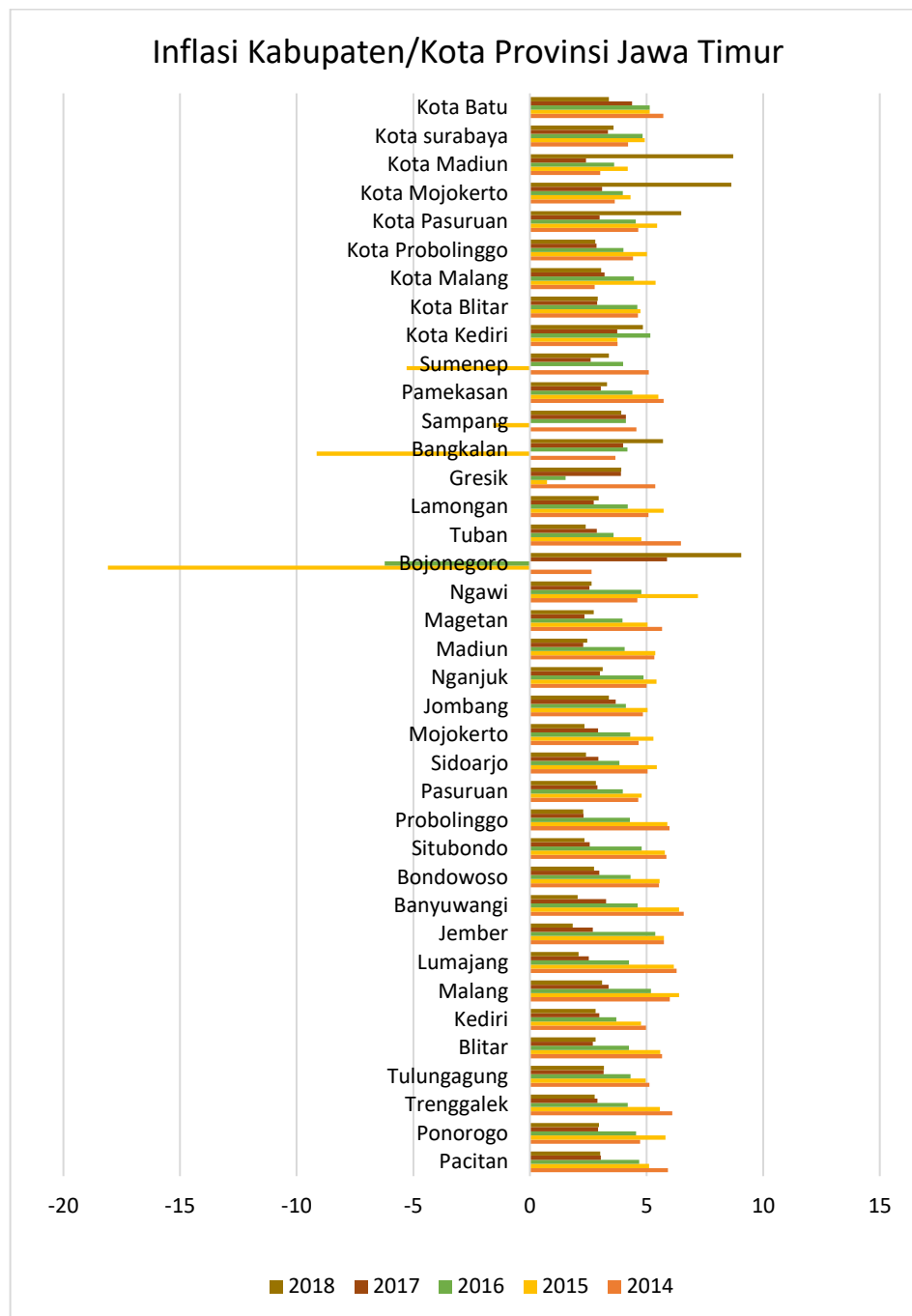
Berdasarkan grafik 1.3 diatas menunjukan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur selama lima tahun selalu mengalami peningkatan. Dimana IPM di Kabupaten/Kota pada tahun 2018 tertinggi yaitu di Kota Surabaya sebesar 81,74, tertinggi kedua yaitu Kota Malang sebesar 80,89, dan tertinggi ketiga yaitu Kota Madiun sebesar 80,33. Sedangkan indeks pembangunan manusia (IPM) terendah yaitu Kabupaten Sampang sebesar 61,00 dan yang kedua yaitu Kabupaten Bangkalan sebesar 62,87. Ini menunjukkan upaya pemerintah Jawa Timur dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Keberhasilan itu ditunjukkan oleh pertama kalinya, di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tidak ada yang berkategori “rendah”. Sebelumnya masih ada satu wilayah yaitu Kabupaten Sampang, pembangunan manusianya berkategori “rendah”. Tetapi pada tahun 2018, sampang naik kelas dengan pembangunan manusia berkategori “sedang”. Walaupun demikian, Pemerintah Jawa Timur tetap perlu meningkatkan kinerja pembangunan manusianya, agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan manusia antar wilayah di Jawa Timur. Wilayah yang mempunyai IPM tergolong “sedang” diupayakan untuk mencapai kategori “tinggi”. Apabila IPM mengalami peningkatan dapat diduga bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan. Jika kesejahteraan meningkat, maka tingkat kemiskinan menjadi berkurang (Adi Widodo, 2011).

Selain PDRB dan IPM, inflasi juga mempengaruhi tingkat kemiskinan. Inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam makro ekonomi yang sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian. Inflasi yang terlalu tinggi akan mengganggu kesetabilan perekonomian dan akan menurunkan nilai mata uang yang pada akibatnya menekan daya beli masyarakat. Sebaliknya, inflasi yang

terlalu rendah merupakan indikator melemahnya daya beli masyarakat yang akan menekan laju pertumbuhan ekonomi. Inflasi berdampak buruk pada perekonomian khususnya pada redistribusi pendapatan dan terjadinya distorsi harga, distorsi penggunaan uang dan distorsi pajak menurut Samuelson dalam Djohanputro (2006:153).

Inflasi merupakan salah satu faktor yang dianggap menyebabkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur dapat meningkat. Mengapa bisa dikatakan demikian, karena jika inflasi terjadi harga barang-barang umum akan merangsek naik, hal tersebut membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan jika hal tersebut terjadi akan membuat masyarakat jauh dari kata sejahtera.

Menurut Sukirno (2002:17) akibat penting dari inflasi ialah cenderung menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat. Artinya, terdapat hubungan yang positif antara inflasi dengan kemiskinan karena apabila tingkat inflasi meningkat akan menyebabkan peningkatan terhadap kemiskinan.



Sumber : BPS Jawa Timur.

Grafik 1.4

Persentases Inflasi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa inflasi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dimana inflasi di Kabupaten/Kota pada tahun 2018 inflasi tertinggi yaitu di Kabupaten Bojonegoro sebesar 9,06 persen. tertinggi kedua yaitu Kota Madiun sebesar 8,71 persen dan tertinggi ketiga yaitu Kota Mojekerto sebesar 8,64 persen, sedangkan inflasi yang paling rendah yaitu Kabupaten Jember yaitu sebesar 1.84. Dimana tingkat inflasi itu dibagi tiga, tingkat inflasi rendah yaitu mencapai dibawah 2 atau 3 persen. Tingkat inflasi moderat mencapai diantara 4 sampai 10 persen sedangkan tingkat inflasi yang serius dapat mencapai beberapa puluh atau beberapa ratus persen dalam setahun (Sadono Sukirno, 2014).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menunjukkan perlunya suatu penelitian yang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dalam periode 2014-2018, tidak hanya faktor-faktor lain di yaitu PDRB, seperti faktor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan faktor Inflasi. Berdasarkan berbagai latar belakang tersebut maka penelitian ini berjudul **“Analisis Pengaruh PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018 ?
2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018?

3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018?
4. Bagaimana pengaruh PDRB, indeks pembangunan manusia (IPM), dan inflasi terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018.
2. Untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018.
3. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018
4. Untuk menganalisis pengaruh PDRB, indeks pembangunan manusia (IPM), dan inflasi terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018.

1.4. kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai guna. Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis dapat dilihat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti, menambah pengetahuan sesuai topik penelitian serta sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Universitas Trunojoyo Madura.
- b. Bagi pembaca, sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya, sekaligus menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis.
- c. Sebagai acuan informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh PDRB, indeks pembangunan manusia dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur.
- d. Sebagai masukan pemikiran kepada pembuat kebijakan dan pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi tingkat jumlah penduduk miskin di wilayah provinsi Jawa Timur.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan kemiskinan atau mengurangi jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah kemiskinan dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti PDRB, indeks pembangunan manusia dan inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Objek penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan periode kurun waktu lima tahun dari 2014- 2018. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur.